

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibukota Indonesia adalah DKI Jakarta yang merupakan kota terpadat setingkat provinsi. Melonjaknya angka kepadatan penduduk di DKI Jakarta menyebabkan berbagai macam masalah seperti meningkatnya pengangguran bertambahnya angka kemiskinan, menurunnya pelayanan kesehatan dan kemacetan lalu lintas (Rahmatulloh, 2017).

Kemacetan lalu lintas selalu menjadi permasalahan di kota DKI Jakarta. Penyebab kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta adalah tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan kapasitas jalan. Hal ini dinyatakan pada data yang dikelola oleh (Polda metro Jaya, 2022), bahwa pertumbuhan ukuran jalan di Jakarta hanya 0.01% setiap tahun, sementara pertumbuhan jumlah kendaraan sekitar 3% setiap tahun. Akibatnya, kendaraan bermotor semakin bertambah di ruas jalan kota Jakarta dan kemacetan pun tidak dapat dihindari. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tingkat kemacetan lalu lintas DKI Jakarta mencapai 48% yang merupakan golongan 'tidak nyaman' dalam berkendara (Polda metro Jaya, 2022).

Kemacetan lalu lintas memberikan dampak buruk seperti, pemborosan energi bahan bakar, peningkatan polusi udara, mengganggu kelancaran pengguna jalan terlebih lagi pada kendaraan darurat seperti, ambulans dan pemadam kebakaran dan memberikan kerugian waktu. Permasalahan dan dampak yang diperoleh, menjadikan pemerintah DKI Jakarta selalu berupaya untuk memberantas kemacetan lalu lintas dengan mengaplikasikan beberapa sistem yang sudah pernah dilaksanakan seperti sistem ganjil – genap yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2018 (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta , 2018) dan aturan *three in one* yang ditetapkan pada keputusan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4104 tahun 2003 (Keputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2003) yang dilakukan di beberapa daerah. Namun, kedua sistem tersebut dianggap tidak efektif karena kemacetan masih tidak dapat diatasi, sehingga pemerintah menetapkan aturan jalan berbayar berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan *Electronic Road Pricing* (ERP).

Electronic Road Pricing (ERP) adalah aturan yang digunakan demi mengurangi volume kendaraan guna mengatasi perkara kemacetan di perkotaan (Sianipar, 2018). *Electronic Road Pricing* (ERP) adalah tarif yang dibebankan kepada pengguna transportasi pribadi yang dilakukan secara elektronik pada kawasan tertentu atau *restricted area*. Dengan sistem ini diharapkan dapat membuat pengguna transportasi pribadi memilih agar beralih ke transportasi umum atau menggunakan jalan alternatif yang lain.

Dalam rencana penerapannya tentu saja ERP memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Maka dari itu diperlukan pengkajian lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam sistem. Kajian tersebut sudah disiapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Segala aspek telah dirancang untuk keberhasilan dari penerapan ERP pada beberapa ruas jalan di Jakarta.

RAPERDA PL2SE Pasal 8 Ayat 2 menjelaskan bahwa jalan Medan Merdeka Barat yang berada di Jakarta Pusat adalah salah satu kawasan yang direncanakan akan diberlakukan sistem *Electronic Road Pricing* (ERP). Karena memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan samaa dengan atau lebih besar dari 0.7 pada jam sibuk. Agar implementasi dari sistem ERP ini dapat memiliki strategi yang tepat maka, dilakukanlah analisis kelayakan ekonomi transportasi dari segi ekonomi dan finansial untuk menciptakan penyedia infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Terhadap latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dapat dirumuskan, antara lain:

1. Apa keterlibatan dari penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) terhadap aspek kehidupan masyarakat berdasarkan sektor transportasi umum dan sektor lalu lintas?
2. Bagaimana jumlah volume kendaraan dibandingkan dengan kapasitas ruas jalan pada jalan Medan Merdeka Barat?
3. Bagaimana *user cost* yang diperhitungkan untuk menerapkan *Electronic Road Pricing* (ERP) terhadap ruas jalan Medan Merdeka Barat?
4. Bagaimana hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial yang ditanggung oleh pengguna dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan sistem *Electronic Road Pricing* (ERP)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk memperkecil adanya penyimpangan ataupun perluasan pokok masalah dengan demikian penelitian menjadi lebih terarah dan dapat menitikberatkan pada pembahasan yang akan diteliti. Berikut adalah Batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian tidak mengkaji mengenai susunan jalan seperti pekerjaan tanah, metode kerja permukaan jalan, saluran drainase, dan lain – lain.
2. Penelitian tidak membahas dan menghitung aspek biaya kecelakaan.
3. Analisis kriteria penilaian investasi berdasarkan aspek ekonomi transportasi dengan menganalisis *Net Present Value* (NPV), *Benefit Cost Ratio* (BCR) dan *Internal Rate of Return* (IRR).
4. Penelitian dilakukan pada ruas jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dihadapi, maka penulisan dari penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan apa keterlibatan dari penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) terhadap aspek kehidupan masyarakat berdasarkan sektor transportasi umum dan sektor lalu lintas.
2. Memaparkan mengenai kemacetan yang diakibatkan oleh jumlah volume kendaraan dengan kapasitas v/c ratio > 0.7 pada jalan Medan Merdeka Barat dan perlunya penerapan *congestion price* untuk membatasi pergerakan kendaraan pada ruas jalan tersebut.
3. Menganalisis *user cost* yang diperhitungkan untuk menerapkan *Electronic Road Pricing* (ERP) pada ruas jalan Medan Merdeka Barat
4. Menganalisis bagaimana manfaat kelayakan ekonomi transportasi dari segi ekonomi dan finansial pada penerapan sistem *Electronic Road Pricing* (ERP) terhadap ruas jalan Medan Merdeka Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai contoh penerapan ilmu yang diperoleh penulis di universitas
2. Bentuk partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang transportasi.
3. Menjadi bahan penilaian terhadap kelayakan dari segi ekonomi dan finansial dalam pengenalan *Electronic Road Pricing* (ERP) pada ruas jalan Medan Merdeka Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari penyusunan penelitian mengenai Analisis Kelayakan Ekonomi

Terhadap Penerapan *Electronic Road Pricing* di DKI Jakarta (Studi Kasus: Jalan Medan Merdeka Barat).

b) Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai kajian teoritis, kajian terhadap prinsip yang berkaitan dengan persiapan implementasi dalam kian, serta pengenalan terhadap penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) di DKI Jakarta.

c) Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini memuat uraian mengenai obyek penelitian, variabel penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, dan penggambaran diagram alir (flowchart) yang akan diterapkan pada penelitian.

d) Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil dan pembahasan penelitian yang berisi mengenai metodologi penelitian, pembahasan, dan analisis terhadap kelayakan ekonomi transportasi pada sistem penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP).

e) Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan akhir dan saran dari hasil penelitian dan proyek dengan mempertimbangkan pembahasan yang dilakukan.

